

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TEORI PERBANKAN

1. Pengertian Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. (Bank Indonesia, 2013)

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah asas yang digunakan oleh perbankan Indonesia, dimana dalam operasionalnya membutuhkan kehati-hatian karena terdapat banyak sekali risiko. Risiko secara umum dapat dikatakan sebagai kemungkinan terdapatnya dampak yang tidak diharapkan dari kondisi yang tidak pasti. (Arthesa, 2006)

Terdapat berbagai definisi mengenai bank atau perbankan, namun pada dasarnya masing-masing pendapat memiliki pengertian yang sama. Salah satu pendapat menyatakan bahwa bank yang mempunyai tugas utama melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bank memiliki tugas menyalurkan dana dari pihak yang surplus ke pihak yang defisit. Kedua tugas tersebut dinamakan fungsi intermediasi. (Suswadi, 2007)

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan Yang dimaksud prinsip syariah disini adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (Bank Indonesia, 2013)

Dari pengertian perbankan tersebut, menurut dapat dijelaskan bahwa bank atau perbankan adalah salah satu lembaga keuangan di Indonesia, dimana bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Menurut

Arthesa (2006) menjelaskan bahwa aktivitas perbankan mempunyai posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran.

2. Aktivitas Perbankan

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah *funding*. Pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan dana atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan tersebut seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka. Pengumpulan dana masyarakat agar mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada di penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, hadiah, pelayanan (operasional) atau jasa lainnya. (Komaryatin, 2006)

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya bunga dan biaya operasional (administrasi).

Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan, keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Semakin besar

atau semakin mahal biaya-biaya yang dikeluarkan perbankan, maka akan semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya.

Keuntungan dari industri perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suatu bank mengalami kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit maka istilah ini dikenal dengan nama *negatif spread*. (Prasetyaningrum, 2010)

3. Jenis dan Usaha Bank

Menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa terdapat dua jenis bank di Indonesia yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sebelum diberlakukan UU ini, terdapat beberapa jenis bank diantaranya bank tabungan, bank pembangunan, bank ekspor-impor, dan sebagainya. Namun saat ini, untuk mempermudah usaha bank dan karena sangat ketatnya persaingan bisnis pada industri perbankan maka pemerintah telah menetapkan hanya ada dua jenis bank saja, yakni bank umum dan BPR. (Arthesa, 2006)

Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari definisi tersebut terlihat perbedaan fungsi antara bank umum

dan BPR. Dalam hal ini BPR memiliki fungsi yang lebih sederhana dibandingkan dengan Bank Umum. (Purwengtyas, 2002)

Menurut Kasmir (2012), terdapat perbedaan-perbedaan antara Bank Umum dan BPR. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Perbedaan Bank Umum dan BPR

Bank Umum	Bank Perkreditan Rakyat
1. Modal yang di setor minimal 3M untuk dapat membuka bank umum.	1. Modal yang disetor minimal 2M untuk daerah khusus Jakarta dan sekitarnya, 1M untuk ibukota provinsi, dan diluar wilayah tersebut pada angka 500 juta.
2. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan Giro, simpanan tabungan dan deposito.	2. Menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito.
3. Bank Umum dapat memberikan jasa kliring.	3. BPR dilarang untuk melakukan kegiatan kliring
4. Dapat melakukan kegiatan valuta asing	4. Dilarang melakukan kegiatan valuta asing.
5. Melakukan perasuransian	5. Dilarang melakukan perasuransian

Sumber: Kasmir (2012)

4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Pengkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Sedangkan Bank pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Bank Indonesia, 2010).

Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Syathiri, 2011). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 menyebutkan bahwa bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan undang-undang No.21 tahun 2008 disebutkan bahwa istilah Bank Pengkreditan Rakyat diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa). (Gatot, 1997)

Dilihat dari jenis usahanya, BPR mempunyai usaha yang lebih sederhana dibandingkan dengan Bank Umum. Meskipun tidak disebutkan secara tegas oleh undang-undang, namun tersirat bahwa Bank Umum mempunyai usaha pokok dan usaha tambahan. Sedangkan BPR hanya menjalankan usaha pokok saja. Namun demikian tidak dapat disimpulkan bahwa BPR merupakan bank khusus di bidang pengkreditan, karena Bank Umum juga mempunyai usaha pengkreditan. Dalam undang-undang tidak ada sifat-sifat khusus yang dimiliki BPR. Sedangkan yang tampak hanya usahanya yang lebih sederhana dibandingkan dengan Bank Umum. (Suparmono, 1997)

Sebagai salah satu lembaga intermediasi, BPR mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank umum. Menurut pasal 21 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, usaha BPR meliputi:

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah/akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, istishna, qardh, dan ijarah.
- c. Menempatkan dana pada Bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening Bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, konvensional, dan UUS.
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan BI.

Sementara itu BPR konvensional tidak diperbolehkan untuk : a) menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, b) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali sebagai pedagang valuta asing. c) melakukan penyertaan modal, d) melakukan usaha

perasuransian, dan e) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (Bank Indonesia, 2013)

BPRS dilarang untuk: a) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah; b) menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; c) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin BI; d) melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah; e) melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR; dan f) melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha BPRS. (Bank Indonesia, 2013)

Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank, dimana hal tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan BPR, BI telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi (SI) dengan tata cara pelaporan dan pengolahan data sebagai berikut:

- a. Sistem pelaporan online, yang memungkinkan BPR untuk menyampaikan laporan berkala secara online kepada BI untuk meningkatkan efektivitas pelaporan serta efisiensi
- b. Sistem pengolahan data, yang dikembangkan untuk menghilangkan pengulangan input data sehingga meminimalisasi *human error* . kemudian data laporan tersebut diolah untuk kepentingan pengawasan

maupun statistik sebagai bahan pendukung kebijakan pengembangan industri BPR. (Bank Indonesia, 2013)

Berdasarkan karakteristik usaha BPR tersebut, maka kegiatan intermediasi yang dilakukan oleh BPR tidak mempengaruhi jumlah uang beredar. Prioritas utama pelayanan jasa keuangan BPR adalah individu dan pengusaha kecil dengan pangsa pasar menengah ke bawah dan pedesaan. Dengan keberadaan usaha kecil dan menengah yang memberikan kontribusi sangat besar bagi perekonomian, maka peranan BPR menjadi sangat strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. (Kusumawardani dkk, 2008)

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR bahwa untuk mendorong terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien, diperlukan BPR yang mampu memberikan pelayanan bagus kepada masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dengan demikian kehadiran BPR sejak awal memang diorientasikan untuk membantu mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi lemah yang belum terjangkau oleh Bank Umum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan berusaha, dan pemerataan pendapatan. (Purwengtyas, 2008)

5. Perbedaan BPR Konvensional dan BPR Syariah

Perbankan di Indonesia menganut sistem *dual system banking*, dimana perbankan dibagi menjadi dua yaitu bank syariah dan bank konvensional.

Demikian juga dengan BPR, juga dibedakan menjadi dua yaitu BPR konvensional dan BPR syariah. (Bank Indonesia, 2010)

BPR konvensionalpun tidak jauh berbeda dengan bank umum konvensional yaitu menjalankan aktivitas usahanya dengan penerapan bunga. Juga dalam hal aktivitasnya berupa menghimpun dana di masyarakat, memberikan kredit deposito dan lain-lain. Hanya saja BPR konvensional tidak ada kegiatan yang namanya giro, dan kegiatan usaha dalam valuta asing. Sedangkan bank syariah adalah bank umum atau bank pembiayaan rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah tidak mengenal bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil. (Denny, 2010) Perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil dapat ditunjukkan oleh tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2. Perbedaan bunga dan bagi hasil

BUNGA	BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu perjanjian (akad) dengan asumsi selalu beruntung.	1. Penentuan nisbah bagi hasil dibuat waktu akad, berpedoman pada untung dan rugi.
2. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjam.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh.
3. Pembayaran bunga tetap tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4. Jumlah pembiayaan bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat.	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh suatu agama.	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: (Antonio, 1999)

B. TEORI PRODUKSI

1. Fungsi Produksi

Hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya dinamakan **fungsi produksi**. Faktor-faktor produksi seperti yang telah dijelaskan dapat dibedakan kepada empat golongan yaitu tenaga kerja, tanah, modal dan keahlian keusahawanan. Di dalam teori ekonomi, didalam menganalisis mengenai produksi selalu dimisalkan bahwa tiga faktor produksi yang belakangan dinyatakan (tanah, modal dan keahlian keusahawanan) adalah tetap jumlahnya. Hanya tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya. Dengan demikian, didalam menggambarkan hubungan di antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai, yang digambarkan adalah hubungan diantara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai (Sukirno, 2009)

Dalam menentukan komposisi faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi, produsen perlu memperhatikan: (i) besarnya pembayaran kepada faktor produksi tambahan yang akan digunakan, dan (ii) besarnya pertambahan hasil penjualan yang diwujudkan oleh faktor produksi tersebut. Menurut Sukirno, untuk meminimumkan biaya/memaksimumkan hasil penjualan) maka prinsip yang harus dipegang produsen adalah “mengambil unit tambahan faktor produksi yang biaya per rupiahnya akan menghasilkan tambahan nilai penjualan yang paling maksimum.

Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi dikenal pula dengan istilah *input* dan jumlah produksi selalu juga disebut sebagai *output*. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut.

$$Q = f(K, L, R, T)$$

dimana: Q = jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi

K = Jumlah stok modal

L = Jumlah tenaga kerja dan ini meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian keusahawanan

R = kekayaan alam

T = tingkat teknologi yang digunakan

Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung pada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 2009). Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi tersebut dalam jumlah yang berbeda-beda juga. Teori produksi dalam ilmu ekonomi membedakan analisisnya kepada dua pendekatan berikut.

- Teori produksi dengan satu faktor berubah.
- Teori produksi dengan dua faktor berubah.

2. Teori Produksi Dengan Satu Faktor Berubah

Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal, tanah, dan teknologi jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. (Sukirno, 2009)

Hukum hasil lebih yang semakin berkurang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari teori produksi. Hukum tersebut menjelaskan sifat pokok dari hubungan tingkat produksi dan tenaga kerja. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya (tenaga kerja) terus menerus ditambah sebanyak satu unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun. (Sukirno, 2009)

Tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan disebut produksi marjinal. Produksi marjinal dapat dihitung dengan rumus:

$$MP = \frac{\Delta TP}{\Delta L}$$

dimana: MP = Produksi Marjinal

ΔTP = pertambahan produksi total

ΔL = pertambahan tenaga kerja

Besarnya produksi rata-rata, yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja disebut average produksi (AP). Menurut Sukirno (2010), AP dapat dihitung dengan rumus:

$$AP = \frac{TP}{L}$$

dimana: AP = Produksi rata-rata

TP = Produksi total

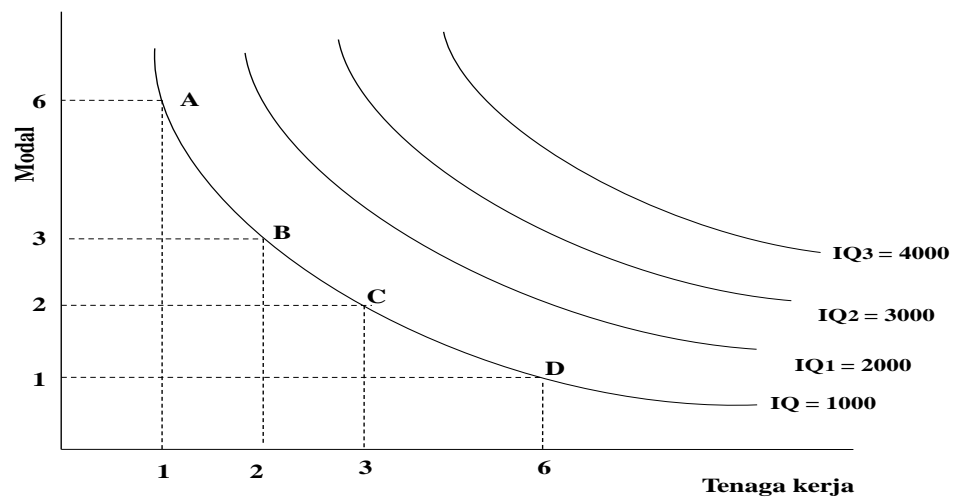
L = Tenaga kerja

3. Teori Produksi Dengan Dua Faktor Berubah

Misal yang dapat berubah adalah tenaga kerja dan modal. Misalkan pula bahwa kedua faktor produksi yang dapat berubah ini dapat dipertukarkan penggunaannya yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal dan sebaliknya.

a. Kurva Produksi Sama (*ISOQUANT*)

Misal seorang pengusaha ingin memproduksi barang sebanyak 1000 unit. Untuk memproduksi barang tersebut ia menggunakan tenaga kerja dan modal yang penggunaannya dapat dipertukarkan.



gambar II-1
Kurva Isoquant

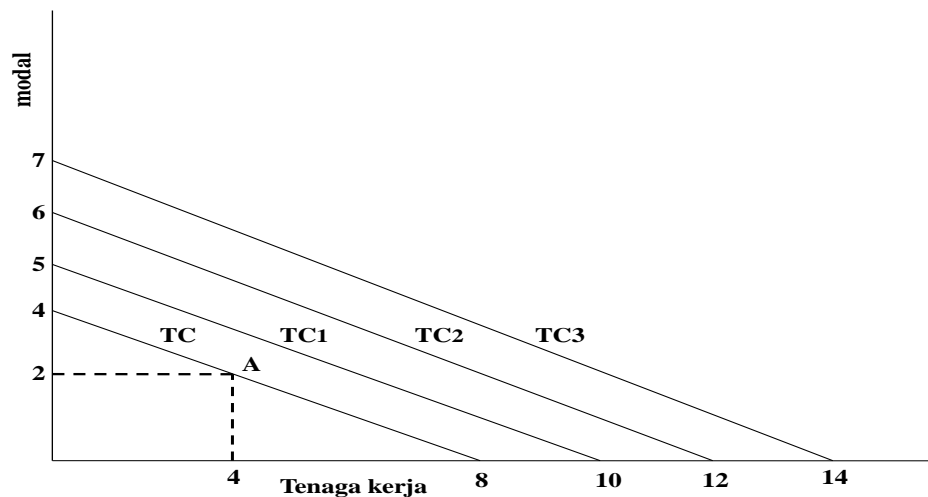
Sumber: Sukirno (2010)

Gambar diatas berdasarkan gabungan tenaga kerja dan modal. Kurva tersebut dinamakan kurva produksi sama atau isoquant. Ia menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Dalam contoh yang dibuat tingkat produksi adalah 1000 unit. Disamping itu didapat kurva IQ_1 , IQ_2 , dan IQ_3 yang terletak di atas kurva IQ . Ketiga kurva lain tersebut menggambarkan tingkat produksi yang berbeda-beda. Semakin jauh dari titik 0 letaknya kurva semakin tinggi tingkat produksi yang ditunjukkan. Masing-masing kurva yang baru tersebut menunjukkan gabungan tenaga kerja dan modal yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat produksi yang ditunjukkan.

b. Garis Biaya Sama (ISOCOST)

Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Untuk membuat analisis

mengenai peminimuman biaya produksi maka perlu dibuat **garis biaya sama** atau **isocost**. Garis ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu.



gambar II-2
Kurva Isocost

Sumber : Sukirno (2010)

Misalkan upah tenaga kerja adalah Rp 10.000 dan biaya modal per unit Rp 20.000. jumlah uang yang tersedia adalah Rp 80.000. Garis TC dalam gambar diatas menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang diperoleh dengan menggunakan Rp 80.000. uang tersebut apabila digunakan untuk memperoleh modal saja akan memperoleh 4 unit, dan kalau digunakan untuk memperoleh tenaga kerja saja akan memperoleh 8 unit. Hal tersebut ditunjukkan dengan garis TC. Selain itu terdapat garis biaya sama yang lain yaitu TC₁, TC₂, dan TC₃. Garis-garis tersebut menunjukkan garis biaya sama apabila jumlah uang tersedia adalah Rp 100.000, Rp 120.000, dan Rp 140.000 (Sukirno, 2010)

4. Teori Biaya Produksi

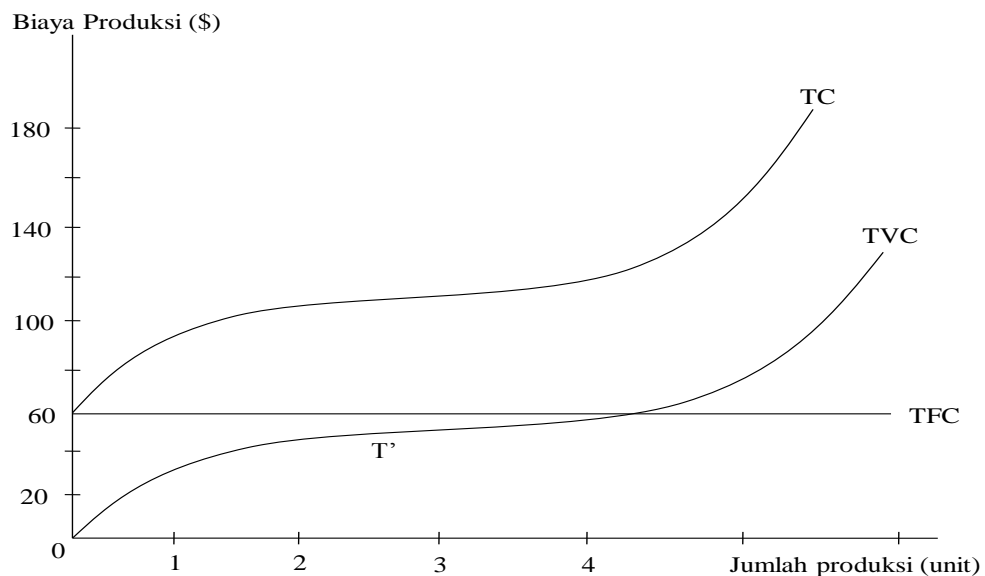
Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut (Sukirno, 2010). Menurutnya, biaya produksi yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu biaya eksplisit dan biaya tersembunyi (*imputed cost*). Sedangkan menurut Salvatore (2006), biaya produksi mencakup biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit merupakan pengeluaran aktual yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang diperlukan. Biaya implisit merupakan nilai input yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam proses produksinya. Nilai input yang dimiliki ini harus dimasukkan atau diperkirakan menurut apa yang dapat mereka peroleh dalam penggunaan alternatif terbaik.

Biaya total adalah keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Konsep biaya total dibedakan menjadi tiga pengertian yaitu biaya total (*Total Cost*), biaya tetap total (*Total Fixed Cost*), dan biaya berubah total (*Total Variable Cost*). Biaya total adalah keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan, didapat dari menjumlahkan biaya tetap total (TFC) dan biaya berubah total (TVC). (Sukirno, 2010)

Biaya tetap total (TFC) mencerminkan seluruh kewajiban atau biaya yang ditanggung oleh perusahaan per unit waktu atas semua input tetap (Salvatore, 2006). Sedangkan menurut Sukirno (2010), biaya tetap total adalah

keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi (input) yang tidak dapat diubah jumlahnya. Contoh: membeli mesin, mendirikan bangunan pabrik.

Biaya variabel total (TVC) menurut Salvatore (2006) adalah seluruh biaya yang ditanggung oleh perusahaan per unit waktu atas semua input variabel yang digunakan. Tetapi menurut Sukirno (2010), TVC berarti biaya berubah total yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Misal: tenaga kerja. Kurva biaya jangka pendek dapat ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.



gambar II-3
Kurva Biaya Produksi

Sumber : Dominick Salvatore (2006)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa TFC adalah \$60 pada segala tingkat output. Terlihat dari kurva TFC yang sejajar dengan sumbu (Q) dan terletak \$60 diatas sumbu tersebut. TVC adalah nol apabila output nol dan meningkat

bila output meningkat. Bentuk khas kurva TVC secara langsung mengikuti hukum hasil yang semakin berkurang. Sampai titik T' perusahaan menggunakan sedikit input variabel bersama-sama dengan input tetap, dan hukum hasil yang semakin berkurang belum berlaku. Oleh karena itu kurva TVC cekung ke bawah dan TVC naik dengan tingkat kenaikan yang kian menurun. Pada titik T' , hukum hasil yang semakin berkurang mulai berlaku, demikian juga disebelah kanan titik T , kurva TVC cekung ke atas dan TVC naik dengan tingkat kenaikan yang kian meningkat. Pada setiap tingkat output, TC sama dengan TFC ditambah TVC. Jadi kurva TC sama bentuknya seperti kurva TVC tetapi terletak \$60 di atasnya. (Salvatore, 2006)

C. TEORI EFISIENSI

1. Konsep Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi dengan mengacu pada filosofi “kemampuan menghasilkan output yang optimal dengan inputnya yang ada”. Dengan demikian ada pemisahan antara input dan output sehingga dapat diidentifikasi alokasi dan total efisiensi. Sehingga dapat dianalisis lebih jauh untuk melihat penyebab inefisiensi suatu perusahaan. (Abidin dan Endri, 2003)

Pengukuran kinerja (*performance*) merupakan salah satu strategi agar dapat memobilisasi sumber daya secara efektif dan dapat memberikan arah pada keputusan strategis yang menyangkut perkembangan suatu organisasi di masa yang akan datang, dengan berpedoman pada indikator-indikator

tertentu. Indikator kinerja adalah suatu ukuran kinerja organisasi yang digunakan jika indikator laba tidak cukup atau tidak relevan dalam menilai kinerja. Penggunaannya telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi untuk mengukur dan mengembangkan kualitas pelayanan mereka. Perusahaan biasanya menggunakan indikator ini untuk mengukur hubungan antara input dan output, sehingga dapat diukur tingkat efisiensi dan kualitas output yang dihasilkan. (Purwengtyas, 2002)

Menurut Shone Rinald (1981) efisiensi merupakan perbandingan output dan input berhubungan dengan tercapainya output maksimum dengan sejumlah input, yang berarti jika ratio output input besar maka efisiensi dikatakan semakin tinggi. Dapat dikatakan bahwa efisiensi adalah penggunaan input yang terbaik dalam memproduksi output. Menurut Etty Puji Lestari (2000), efisiensi adalah rasio antara output dan input, sedangkan menurut Dinc dan Haynes (1999) efisiensi merupakan seluruh kriteria penting dalam menentukan seberapa besar input yang digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Secara sederhana, menurut Nopirin (1997) efisiensi dapat berarti tidak adanya pemborosan.

Ada tiga faktor yang menyebabkan efisiensi yaitu apabila dalam input yang sama menghasilkan output yang lebih besar, dengan input yang lebih kecil menghasilkan output yang sama dan dengan input yang besar menghasilkan output yang lebih besar. Sedangkan menurut Hartono (2007), perusahaan agar efisien dapat dilakukan dengan memaksimalkan output dengan input yang sudah ditetapkan atau meminimumkan input dengan

output yang sudah ditetapkan. Pilihan perusahaan terhadap suatu diantara dua hal tersebut ditentukan oleh reaksi pasar yang ada.

Suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) dikatakan efisien secara teknis apabila menghasilkan output maksimal dengan sumber daya tertentu atau memproduksi sejumlah tertentu output menggunakan sumber daya yang minimal, dan UKE dalam efisiensi ekonomis menghadapi kendala besarnya harga input, sehingga suatu UKE harus dapat memaksimalkan penggunaan input sesuai dengan anggaran yang tersedia. Produsen harus mengkombinasikan faktor seefisien mungkin agar biaya input yang digunakan paling rendah. (Komaryatin, 2006)

Menurut Hartono (2009), upaya peningkatan efisiensi BPR dari sisi output antara lain dapat dilakukan dengan: a) meningkatkan penyediaan jasa perbankan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan BPR untuk memitigasi resiko, b) pengembangan aset likuid. Sementara dari sisi input, peningkatan efisiensi dapat dilakukan dengan cara mengurangi biaya tenaga kerja melalui kualitas SDM, mengurangi aktiva tetap, dan mencari sumber pendanaan murah.

2. Pengukuran Efisiensi

Ditinjau dari teori ekonomi, ada dua pengertian efisiensi yaitu efisiensi teknik dan efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi mempunyai sudut pandang makro yang jangkauannya lebih luas dibandingkan efisiensi teknik. Pengukuran efisiensi teknik cenderung terbatas pada hubungan teknis dan operasional dalam proses konversi input menjadi output. Akibatnya, usaha

untuk meningkatkan efisiensi hanya memerlukan kebijakan mikro yang bersifat internal yaitu pengendalian dan alokasi sumberdaya yang optimal. (Ghofur dalam Atmawardhana, 2006)

Menurut Coelli *et al.* (1998) menyatakan bahwa konsep efisiensi dibedakan menjadi tiga yaitu efisiensi teknis (*technical efficiency*), efisiensi harga (*price efficiency*), dan efisiensi ekonomis (*economic efficiency*). Efisiensi teknis mengukur tingkat produksi yang dicapai pada tingkat penggunaan input tertentu. Sebuah bank secara teknis dikatakan lebih efisien dibandingkan bank lain apabila dalam penggunaan jenis dan jumlah input yang sama diperoleh output secara fisik yang lebih tinggi., namun tidak melibatkan faktor harga. Efisiensi harga atau alokatif mengukur tingkat keberhasilan Bank dalam usahanya untuk mencapai keuntungan maksimum yang dicapai pada saat nilai produk marginal setiap faktor produksi yang diberikan sama dengan biaya marginalnya. Efisiensi ekonomis adalah kombinasi antara efisiensi teknis dan efisiensi harga.

3. Efisiensi Produksi

Di asumsikan bahwa ada total penawaran tetap dua input yaitu tenaga kerja dan modal yang dibutuhkan untuk memproduksi dua produk yang sama. Namun bukan hanya dua orang lagi, sekarang kita mengasumsikan bahwa banyak konsumen memiliki input untuk produksi dan memperoleh pendapatan dengan menjualnya. Pada gilirannya, pendapatan ini dialokasikan diantara dua barang tersebut. Apabila harga satu input naik, individu yang menawarkan banyak input tersebut memperoleh lebih banyak pendapatan dan

mengkonsumsi lebih banyak dari kedua barang tersebut. Pada gilirannya hal ini akan menaikkan permintaan untuk input yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut dan mempunyai efek timbal balik terhadap harga input tersebut. Sehingga ditemukan harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan. (Pindyck, 2009)

Efisiensi produksi digambarkan dalam kotak Edgeworth. Penggunaan input yang efisien terjadi apabila isokuan untuk kedua barang tersebut bersinggungan. Suatu rangkaian isokuan produksi memperlihatkan tingkat output yang diproduksi dengan berbagai jenis kombinasi input. Masing-masing isokuan melambangkan total produksi suatu barang yang dapat diperoleh tanpa membedakan perusahaan tersebut. (Pindyck, 2009)

Suatu pengalokasian input tertentu ke dalam proses produksi akan efisien secara teknis jika output satu barang tidak mungkin dinaikkan tanpa menurunkan output barang lainnya. Dengan kata lain, efisiensi secara teknis adalah apabila perusahaan-perusahaan menggabungkan input-input untuk memproduksi output tertentu dengan semurah mungkin (Pindyck, 2009).

Selain itu agar suatu perekonomian efisien, barang tidak boleh hanya diproduksi dengan biaya minimum, tetapi barang juga harus diproduksi dalam kombinasi yang sesuai dengan kesediaan orang-orang yang mau membayarnya. Suatu perekonomian memproduksi output secara efisien hanya jika bagi masing-masing konsumen $MRS=MRT$. Kombinasi output yang efisien dihasilkan apabila tingkat transformasi marjinal antar kedua barang tersebut (yang mengukur biaya untuk memproduksi satu barang dibandingkan

barang lainnya) sama dengan tingkat substitusi marjinal konsumen (yang mengukur manfaat marjinal mengkonsumsi satu barang dibandingkan barang lainnya).

4. Efisiensi Perbankan

Efisiensi bank merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisa *performance* suatu bank dan juga sebagai sarana untuk lebih meningkatkan efektifitas kebijakan moneter. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi biaya (*cost efficiency*) dan keuntungan (*profit efficiency*). *Profit Efficiency* sendiri dibedakan menjadi dua yaitu *Standard Profit Efficiency* dan *Alternative Profit Efficiency*. (Suswadi, 2007)

Bank dikatakan mencapai efisiensi dalam skala ketika perbankan bersangkutan mampu beroperasi dalam skala hasil yang konstan (*constant return to scale*). Sedangkan efisiensi cakupan tercapai ketika perbankan mampu beroperasi pada diversifikasi lokasi. Efisiensi alokasi tercapai ketika bank mampu menentukan berbagai output yang mampu memaksimalkan keuntungan. Sedangkan efisiensi teknis merupakan hubungan antara input dengan output dalam suatu proses produksi. Suatu proses produksi dikatakan efisien jika pada penggunaan input sejumlah tertentu dapat dihasilkan output yang maksimal, atau untuk menghasilkan output sejumlah tertentu digunakan input yang paling minimal.

Secara umum ada tiga pendekatan konsep dasar model efisiensi sektor finansial (perbankan) yaitu *Cost efficiency*, *Standard Profit Efficiency*, dan *Alternatif Profit Efficiency*. (Astiyah dan Husman, 2006)

Cost efficiency pada dasarnya mengukur tingkat biaya suatu bank dibandingkan dengan bank yang memiliki biaya operasi terbaik (*best practice bank's cost*) yang menghasilkan output yang sama dengan teknologi yang sama. *Cost efficiency* ini di derivasi dari suatu fungsi biaya, misalkan fungsi biaya dengan bentuk persamaan umum (log) sebagai berikut :

$$\log C = f(w, y) + e$$

dimana C adalah total biaya suatu bank, w adalah vektor harga input, y adalah vektor kuantitas output, e adalah *error term* dimana $e=u+v$. Dimana u adalah *controllable factor* yang merefleksikan faktor inefisiensi sehingga dapat meningkatkan biaya suatu bank diatas *best practice bank's cost*, sedang v adalah *uncontrollable (random) factor* atau noise term. *Cost efficiency ratio* (CEFF) adalah proporsi dari biaya atau *resources* yang digunakan secara efisien. Misal CEFF suatu bank adalah 80%, hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut beroperasi secara efisien sebesar 80% atau terdapat 20% biaya yang terbuang. (Suswadi, 2007)

Standard Profit Efficiency pada dasarnya mengukur tingkat efisiensi suatu bank didasarkan pada kemampuan bank untuk menghasilkan profit maksimal pada tingkat harga output tertentu dibandingkan dengan tingkat keuntungan bank yang beroperasi terbaik (*best practice bank*) dalam sampel. Model ini seringkali dikaitkan dengan suatu kondisi pasar persaingan sempurna dimana harga input dan output ditentukan oleh pasar. Dengan kata lain tidak satupun bank yang dapat menentukan harga input maupun harga output sehingga bank bertindak sebagai *price-taking agent*. Misal didapatkan

nilai *Standard Profit Efficiency* sebesar 80%, hal ini berarti bahwa bank kehilangan 20% dari keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh kalau beroperasi secara efisien. Atau dengan kata lain terdapat inefisiensi sebesar 20% (Suswadi, 2007)

Alternative Profit Efficiency ini berbeda dengan *Standard Profit Efficiency* karena sifat pasar pada model ini adalah pasar persaingan sempurna. Sedangkan dalam *Alternative Profit Efficiency* terjadi pada pasar persaingan tidak sempurna (*imperfect market competition*). Pada kondisi pasar ini maka bank diasumsikan memiliki *market power* dalam menentukan harga output namun tidak pada harga input. Karena perbedaan jenis pasar tersebut maka perbedaan yang paling menonjol antara kedua model ini adalah penentuan variabel eksogen didalam pencapaian keuntungan maksimum. Pada model ini variabel eksogen adalah tingkat output. Dalam pendekatan ini bank akan memaksimalkan keuntungan dengan memilih harga output (p), jumlah input (x), untuk sejumlah output (y), dan harga input (r) yang telah ditetapkan. Fungsi *indirect profit* yang sesuai disebut sebagai fungsi *indirect profit alternative* yang dapat dituliskan sebagai berikut. (Suswadi, 2007)

$$Max\pi = PQ = p, r (y, -x)$$

Menurut Elvira (2012), secara keseluruhan efisiensi perbankan berupa:

1. Efisiensi skala: bank dikatakan efisien dalam skala ketika bank bersangkutan mampu beroperasi dalam skala hasil yang konstant.
2. Efisiensi dalam cakupan: ketika bank mampu beroperasi pada diversifikasi lokasi. Efisiensi keuntungan penghematan skala dan

cakupan yang diharapkan berupa keanekaragaman produk, identifikasi merk, penggunaan biaya tetap, meningkatkan *leverage* operasional, dan mengurangi resiko penghasilan. (Maflachatun, 2010)

3. Efisiensi alokasi: ketika bank mampu menentukan berbagai output yang memaksimalkan keuntungan.
4. Efisiensi Teknis: pada dasarnya menyatakan hubungan antara input dan output dalam suatu proses produksi.
5. Efisiensi skala ekonomi: pada dasarnya berupa penghematan biaya.
6. Efisiensi profitabilitas: menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan profit.

Pengukuran efisiensi perbankan menurut Akhmad Syakir Kurnia (2004) memiliki dua pendekatan yaitu pendekatan produksi dan pendekatan intermediasi. Dalam pendekatan produksi, bank ditempatkan sebagai unit kegiatan ekonomi yang melakukan usaha menghasilkan output berupa jasa simpanan dengan menggunakan seluruh input yang dikuasainya. Sedangkan dalam pendekatan intermediasi, bank ditempatkan sebagai unit kegiatan ekonomi yang melakukan transformasi berbagai bentuk dana yang dihimpun ke dalam berbagai bentuk pinjaman. (Bank Indonesia, 2013)

Pengukuran efisiensi teknis dan profitabilitas suatu organisasi seperti bank bukanlah perkara yang mudah. Kendala dalam pengukuran efisiensi menurut Kusmargiani (2006) disebabkan oleh beberapa faktor yaitu bank merupakan kumpulan sumber daya yang kompleks. Selain itu, bank tersusun

dari proses transformasi yang multi dimensional dimana banyak input yang dimanfaatkan untuk menghasilkan banyak output pula.

D. Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian mengenai perbandingan efisiensi BPR konvensional dan BPR syariah ini telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh Denny Prasetyaningrum tahun 2010 dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) pada Bank Konvensional dan Bank Syariah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja yang ditunjukkan dengan efisiensi pada bank di tahun 2008, baik bank umum konvensional dengan prinsip bunga maupun bank umum syariah dengan prinsip syariah. Hasilnya adalah bank-bank konvensional dan bank umum syariah yang tercatat di BEJ dan BI dinilai cukup efisien dengan nilai efisiensi yang berkisar antara 86.55% - 97.58%.

Penelitian yang dilakukan oleh Litta Rachmalia pada tahun. 2011. Berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja keuangan Antara BPR Konvensional dengan BPR Syariah di Indonesia. Penelitian ini menganalisis perbandingan kinerja keuangan antara BPR konvensional dan syariah BPR yang berada di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2011. Perbandingan ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan study sensus. Hasil analisis didasarkan pada Uji statistik independen dimana membandingkan dua rata-rata dua grup yang tidak berhubungan untuk variabel yang saling berhubungan. Hasil yang didapat

dari penelitian ini adalah bahwa terdapat perbandingan yang signifikan dari kinerja keuangan antara BPR Syariah dan BPR Konvensional dimana kinerja keuangan BPR konvensional lebih tinggi daripada BPR syariah.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Umar Hamdan dan Andi Wijaya pada tahun 2005, dimana dalam penelitian tersebut mengangkat judul “Analisis Komparatif Resiko Keuangan bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan BPR Syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu BPR konvensional yang diberi nama “S” dan satu BPR syariah yang diberi nama “F”. Variabel yang digunakan adalah kas, giro, kredit, aktiva tetap dan aktiva lain, kewajiban segera, tabungan, deposito, pinjaman dan ekuitas, pendapatan bunga, beban bunga, pendapatan operasi lainnya, pendapatan non operasi, dan laba bersih. Teknik analisisnya dengan analisis rasio keuangan dan analisis diskriminan keuangan. Kesimpulan yang didapat dari analisis ini adalah bahwa secara umum rasio likuiditas BPR syariah relatif lebih baik dibanding BPR konvensional. Selain itu, nilai Z BPR syariah relatif lebih tinggi dibanding BPR konvensional yang berarti bahwa resiko keuangan BPR syariah relatif lebih rendah dibandingkan resiko pada BPR konvensional.

Penelitian sejenis yang lain juga dilakukan oleh Aries Tri Cahyadi pada tahun 2010. Penelitian yang diangkat berjudul “Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank pembiayaan Rakyat Syariah di Surabaya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Loan to Deposit Ratio (LDR)* atau *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Cash*

Ratio (CR), Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF), Aktiva Produktif bermasalah (APB), Return On Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), CAR, dan aktiva tetap terhadap modal. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung kinerja keuangan dari masing-masing bank yang digunakan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah jika dilihat dari LDR atau FDRnya, BPR lebih mampu membayar kembali kewajiban pada nasabah yang telah menanamkan dananya daripada BPRS. Jika dilihat dari CR, kinerja BPR lebih baik jika dibandingkan dengan BPRS. Dilihat dari NPL, BPRS memiliki resiko yang lebih besar untuk terjadi kredit bermasalah dibandingkan dengan BPR. Sedangkan jika dilihat dari ROA, BPR memiliki kemampuan memperoleh laba yang lebih besar daripada BPRS.

Penelitian dilakukan oleh Thorsten Beck, Asli Demircug-Kunt, dan Ouarda Merrouche pada tahun 2012. Penelitian ini berjudul “Islamic vs Conventional banking : Business model, efficiency and stability”. Jurnal ini mengkombinasikan model bisnis, efisiensi, kualitas aset, dan stabilitas antara bank islami dan konvensional, dengan menggunakan beberapa indikator yang disusun dari neraca dan laporan laba rugi. Data yang diambil adalah menggunakan sampel dari 22 negara baik bank syariah maupun konvensional. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bank-bank islam (bank syariah) kurang efisien jika dibandingkan dengan bank konvensional, tetap memiliki rasio intermediasi lebih tinggi, memiliki aset yang lebih tinggi

kualitasnya, dan dikapitalisasi lebih baik daripada bank konvensional. Selain itu bank syariah juga memiliki kinerja yang lebih baik selama krisis dalam hal permodalan dan kualitas aset, sehingga hal ini telah membantu bank Islam mengungguli bank konvensional selama krisis.

Penelitian yang dilakukan oleh Denny Kusumawardani pada tahun 2008, yang kemudian diterbitkan dalam majalah Ekonomi Tahun XVIII No.2 Agustus 2008., dimana penelitian tersebut berjudul “Tingkat kesehatan dan efisiensi bank pengkreditan rakyat jawa timur”. Dalam penelitian ini menggunakan Model DEA yang mengacu pada pendekatan intermediasi dengan spesifikasi variabel: pinjaman sebagai variabel output, dan simpanan serta aktiva tetap sebagai variabel input. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa sebagian besar kantor cabang BPR Jatim kurang efisien (ditunjukkan dengan skor efisiensi kurang dari 1). Dari 22 kantor cabang hanya terdapat 2 kantor cabang saja yang mencapai efisiensi 100%, yaitu BPR Kediri dan BPR Lamongan. selanjutnya kedua kantor cabang tersebut digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan efisiensi BPR lain yang kurang efisien.